

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian Identifikasi Pengaruh Infrastruktur terhadap Harga Beras di Lima Pasar Utama Kabupaten Malang terdiri dari dua kesimpulan berdasarkan tiga analisis yang telah dilakukan, yaitu kondisi harga jual beras, kondisi infrastruktur, dan pengaruh infrastruktur terhadap harga beras.

##### 5.1.1 Kondisi Harga Beras di Lima Pasar Utama Kabupaten Malang

Biaya input usaha tani tertinggi terdapat di Kecamatan Jabung sebesar Rp.3.616.300 dan Karangploso sebesar Rp.3.652.000, hal tersebut dipengaruhi oleh besarnya penggunaan biaya pembelian pupuk. Selain pupuk, faktor terbesar yang mempengaruhi perbedaan biaya input usaha tani adalah upah tenaga kerja. Biaya upah tenaga kerja tertinggi terdapat di Kecamatan Bululawang sebesar Rp.22.000 untuk laki-laki, serta Rp. 17.000 untuk perempuan dan Kecamatan Karangploso Rp.21.000 untuk laki-laki, serta Rp. 16.000 untuk perempuan. Besarnya biaya upah tenaga kerja dipengaruhi sulitnya mencari tenaga kerja untuk pertanian sawah. Hal tersebut dikarenakan masyarakat usia dewasa lebih memilih pekerjaan di sektor lain, khususnya di daerah perkotaan.

Biaya output usaha tani pada petani tertinggi terdapat di Kecamatan Bantur sebesar Rp. 4.300/Kg, sedangkan terendah terdapat di Kecamatan Jabung Rp.3.900/Kg. Salah satu faktor pengaruh terhadap penentuan harga beli gabah petani adalah biaya transportasi. Terbatasnya aksesibilitas menuju lokasi areal sawah mempengaruhi modal para distributor, sehingga terjadi permainan harga pada harga beli gabah di petani.

Pada biaya output antar distributor, perbedaan biaya output di setiap kecamatan dipengaruhi besarnya masing-masing margin keuntungan tiap distributor. Selain itu, perbedaan biaya output di setiap distributor dipengaruhi oleh stok produksi gabah di setiap kecamatan. Besarnya ketersediaan gabah di setiap kecamatan mempengaruhi besar harga beras masing-masing kecamatan. Harga beras tertinggi terdapat di Kecamatan Bululawang sebesar Rp.8.200/Kg. Harga beras terendah terdapat di Kecamatan Bantur dan Sumberpucung sebesar Rp.7.000/Kg.

### 5.1.2 Kondisi Infrastruktur di Lima Kecamatan di Kabupaten Malang

Secaram umum ketersediaan infrastruktur jalan di lima kecamatan didominasi oleh perkerasan makadam. Dalam menunjang aktivitas pertanian khususnya menuju lokasi-lokasi sawah, ketersediaan infrastruktur jalan perkerasan aspal lebih dominan dibandingkan kondisi jalan lainnya. Ketersediaan jalan perkerasan aspal terendah dalam menuju lokasi sawah terdapat di Kecamatan Jabung. Kondisi tersebut menyebabkan semakin besarnya waktu yang diperlukan untuk menuju pusat-pusat lokasi sawah. Para distributor menempuh perjalanan menuju pusat lokasi sawah dari pusat kecamatan dengan rata-rata lama perjalanan 33.83 menit untuk jarak  $\pm 3.68$  Km. Ketersediaan jalan perkerasan aspal tertinggi terdapat di Kecamatan Bantur. Ketersediaan jalan perkerasan aspal mendukung aktivitas distribusi pertanian di kecamatan tersebut. Para distributor dapat menempuh perjalanan menuju pusat di lokasi sawah dari pusat kecamatan dengan rata-rata lama perjalanan 28.4 menit dengan jarak rata-rata  $\pm 4.94$  Km.

Kondisi infrastruktur irigasi dalam menunjang pertanian di lima kecamatan didominasi kerusakan. Kondisi kerusakan infrastruktur irigasi terbesar terdapat di Kecamatan Bululawang dan Kecamatan Sumberpucung. Kerusakan pada irigasi tersebut menyebabkan kemungkinan terjadinya kebocoran air. Hal tersebut berdampak pada pemerataan air di setiap kecamatan, serta sistem pengairan yang kurang efektif. Permasalahan pemerataan air berdampak pada pola tanam padi, dimana hal tersebut berpengaruh terhadap luas panen di setiap kecamatan. Luas panen di Kecamatan Bululawang dan Kecamatan Sumberpucung masing-masing sebesar 1.267 Ha dan 2.377 Ha, dimana terendah diantar tiga kecamatan lainnya. Kondisi kerusakan infrastruktur terendah terdapat di Kecamatan Karangploso. Kondisi tersebut berdampak pada besarnya luas panen di kecamatan tersebut. Luas panen di Kecamatan Karangploso sebesar 2.887 Ha, dimana terbesar diantar empat kecamatan lainnya.

Kelembagaan terkait sarana produksi belum menunjang usaha pertanian. KUD merupakan kelembagaan terkait penyediaan sarana produksi. Permasalahan dalam ketersediaan sarana produksi berdampak pada keterlambatan para petani dalam proses produksi usaha tani. Terkait kelembagaan usaha tani, keterbatasan kemampuan dan pengalaman kelembagaan pertanian berpengaruh terhadap kemampuan para petani. Kurangnya kemampuan dan pengalaman berdampak pada keberhasilan setiap lembaga

dalam pendekatan terkait penyuluhan terhadap para petani. Kelembagaan kelompok tani dengan tingkat kemampuan terendah terdapat di Kecamatan Jabung. Kemampuan penyuluhan oleh kelembagaan kelompok tani berdampak pada tingkat produktivitas padi masing-masing kecamatan. Produktivitas padi di Kecamatan Jabung sebesar 56,7 Kw/Ha. Selain kemampuan kelembagaan, terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan program penyuluhan dan peningkatan produktivitas padi. Kecamatan Bantur mempunyai produktivitas padi tertinggi sebesar 100,12 Kw/Ha. Ketersediaan kelembagaan kelompok tani dengan tingkat lanjut di Kecamatan Bantur tergolong kecil dibandingkan Kecamatan Bululawang, Kecamatan Sumberpucung, dan Kecamatan Karangploso. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan program penyuluhan terkait peningkatan produktivitas padi di kecamatan tersebut adalah besarnya eksistensi para petani dalam menerapkan hasil penyuluhan pertanian.

Kelembagaan permodalan belum menunjang usaha tani, hal tersebut terlihat dimana para petani masih mengalami kendala modal. Untuk kelembagaan pemasaran, lembaga yang paling berperan di lima kecamatan adalah tengkulak. Namun terjadi konflik persaingan terkait penentuan harga jual gabah antar petani dan tengkulak. Terkait peranan kelembagaan penunjang yaitu HIPPA, keterbatasan anggaran dan keterbatasan SDM anggota HIPPA menjadi kendala dalam menjalankan peran kelembagaan tersebut. Kendala lainnya adalah sifat petani yang cenderung berlebihan dalam pengairan dan mementingkan golongan pribadi.

### **5.1.3 Pengaruh Infrastruktur terhadap Harga Beras di lima Pasar Utama Kabupaten Malang**

Infrastruktur jalan berpengaruh terhadap besaran harga beras. Faktor kondisi perkerasan infrastruktur jalan, jarak dan waktu perjalanan berpengaruh terhadap besaran biaya transportasi. Hal tersebut mempengaruhi besaran harga beli gabah pada petani. Harga beli gabah terbesar terdapat di Kecamatan Bantur yaitu sebesar Rp.4.300/Kg. Kondisi tersebut didukung oleh ketersediaan perkerasan aspal dalam menuju titik pusat lokasi sawah sebesar 88,05%. Kondisi perkerasan aspal terendah diantara lima kecamatan terdapat di Kecamatan Jabung yaitu sebesar 8,15%. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya harga beli gabah pada petani di kecamatan tersebut. Besaran harga beli gabah di Kecamatan Jabung sebesar Rp.3.900/Kg.

Infrastruktur irigasi tidak berpengaruh langsung terhadap harga beras. Berdasarkan analisis sebelumnya, infrastruktur irigasi berpengaruh terhadap luas panen dimana berdampak pada produksi gabah setiap kecamatan. Hal tersebut berdampak pada ketersediaan beras di setiap kecamatan, sehingga mempengaruhi kondisi harga beras di pasaran. Luas panen terendah diantara lima kecamatan terdapat di Kecamatan Bululawang. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya jumlah produksi padi di kecamatan tersebut. Besaran harga beras di pasar utama Kecamatan Bululawang sebesar Rp.8.200/Kg.

Infrastruktur kelembagaan berperan terkait penyediaan sarana produksi, sarana penyuluhan usaha tani, sarana pemasaran, serta sarana penunjang berupa permodalan dan pengadaan program-program penyuluhan dan peningkatan infrastruktur pendukung usaha tani. Belum optimalnya kelembagaan terkait penyediaan sarana produksi berdampak pada keterlambatan pihak petani terkait proses produksi usaha tani. Pihak petani terpaksa mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan sarana produksi. Hal tersebut terpaksa dilakukan untuk menghindari terjadinya gagal panen. Peran kelembagaan pemasaran belum menunjang terkait usaha pertanian. Hal tersebut terlihat dimana pihak petani merupakan pihak yang dirugikan terkait penentuan harga jual gabah. Terkait kelembagaan permodalan, pihak KUD dan gapoktan belum optimal dalam menunjang permodalan petani. Hal tersebut terlihat dimana pihak petani masih mengalami permasalahan modal. Terkait sarana penunjang lainnya yaitu HIPPA, lembaga tersebut tidak berpengaruh langsung terkait harga beras. Tujuan lembaga tersebut adalah pemerataan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengairan usaha tani.

Belum optimalnya sarana produksi, permodalan, maupun pemasaran berdampak pada antusias pihak petani dalam melakukan usaha tani padi. Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan para petani terkait peningkatan jumlah produksi pada di setiap kecamatan. Menurunnya jumlah produksi padi berdampak pada peningkatan harga beras di pasar-pasar setiap kecamatan. Terkait kelembagaan usaha tani, peran lembaga kelompok tani berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas padi, dimana mempengaruhi ketersediaan beras setiap kecamatan. Kemampuan kelompok tani berpengaruh terhadap keaktifan kelompok dalam meningkatkan usaha tani.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Kondisi Infrastruktur terhadap Ketahanan Pangan, saran yang diberikan yaitu:

- A. Perlu adanya peningkatan infrastruktur jalan meliputi kondisi serta lebar jalan. Hal tersebut bertujuan meningkatkan kemudahan akses distribusi barang usaha tani, dimana dapat memperkecil biaya transportasi yang berpengaruh terhadap harga input maupun output dalam usaha tani. Terkait akses infrastruktur jalan di persawahan, perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas jalan usaha tani. Selain mempermudah akses distribusi, jalan usaha tani berfungsi terkait kemudahan penyuluhan usaha tani. Terkait permasalahan lahan dalam pengadaan jalan usaha tani, perlu dikeluarkannya kebijakan insentif terhadap pemilik lahan untuk pembangunan jalan usaha tani.
- B. Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi. Hal tersebut bertujuan meningkatkan pengairan sawah, dimana pengairan merupakan salah satu faktor penting dalam produktivitas sawah dan luas panen. Hal tersebut berpengaruh terhadap ketersediaan beras di setiap kecamatan, dimana berdampak pada harga beras tersebut.
- C. Perlu adanya peningkatan kerjasama yang melibatkan setiap lembaga pertanian formal maupun non formal dengan para petani. Hal tersebut bertujuan meningkatkan intensifikasi pertanian, infrastruktur dan teknologi pertanian, serta jaminan permodalan dan pemasaran bagi petani. Sehingga diharapkan tercipta peningkatan produksi beras setiap kecamatan, serta berkurangnya praktik monopoli terkait penjualan gabah.
- D. Penelitian ini masih sangat terbatas karena adanya keterbatasan data dan waktu. Penelitian ini hanya menitikberatkan pengaruh kondisi perkerasan dan aksesibilitas infrastruktur jalan, ketersediaan dan kondisi kerusakan infrastruktur irigasi, serta peranan kelembagaan pada harga beras IR.64. Masih banyak aspek yang bisa dijadikan indikator harga beras seperti kualitas beras, kondisi wilayah, pengaruh impor beras, jenis beras lainnya dan berbagai aspek lain yang nantinya dapat melanjutkan penelitian. Perlu adanya studi lanjutan yang lebih mendalam dengan data dan metode yang lebih lengkap, sehingga dapat melengkapi hasil penelitian

yang telah ada dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan berbagai pihak yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk mencapai keterjangkauan pangan dimana kemudahan rumah tangga untuk memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau.

